

PELAKSANAAN LELANG MELALUI INTERNET (STUDI KASUS PELAKSANAAN LELANG PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN)

A. Syarif

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 74201, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)

Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 18810669

e-mail : syarifzoow@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci : Lelang, Internet, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Objek lelang yang ditawarkan pada KPKNL Banjarmasin diantaranya adalah bangunan gedung sekolah, paket kayu olahan, paket kayu bulat, mobil, rumah, tanah, tanah beserta bangunannya, sepeda motor. Adapun isi hukum yang ingin dibahas yaitu terkait pembelian kendaraan bermotor yang dilelang secara online dimana konsumen bisa merasa dirugikan karena tidak memperoleh informasi kondisi terkini kendaraan baik kondisi mesin dan perpajakan kendaraan bermotor sehingga konsumen/pembeli lelang secara online merasa dirugikan. Sedangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana pelaksanaan lelang online kendaraan bermotor di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin dan Bagaimana efektivitas lelang online dalam pembelian kendaraan bermotor melalui lelang online di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat untuk dianalisis dengan teori-teori dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku yaitu tentang Pelaksanaan Lelang Melalui Internet (Studi Kasus Pelaksanaan Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin)

Dari penelitian ini diperoleh hasil pertama Pelaksanaan lelang online di KPKNL Banjarmasin terdiri dari beberapa tahap yaitu calon pembeli melihat penawaran barang melalui situs lelang online KPKNL Banjarmasin www.lelang.go.id, selanjutnya calon pembeli membuat akun dan melengkapi data-data yang diperlukan, selanjutnya memberikan penawaran melalui situs lelang online yang telah disediakan, selanjutnya bagi pemenang akan dibuatkan administrasi untuk serah terima barang lelang. Kedua, Penulis berpendapat pelaksanaan lelang secara

online tidak efektif karena informasi yang tidak lengkap, kondisi barang yang tidak sesuai sehingga pemenang lelang/pembeli merasa dirugikan karena tidak diinformasikan terkait kondisi barang secara lengkap sehingga seringkali mengeluarkan biaya lebih untuk memperbaiki kendaraan bermotor yang dibeli serta melunasi tunggakan pajak yang tidak diinformasikan oleh pelaksana lelang online sebelumnya.

ABSTRACT

Keywords: Auctions, Internet, Office of the State Asset Service and Auctions

The auction objects offered at the Banjarmasin KPKNL include school buildings, processed wood packages, log packages, cars, houses, land, land and buildings, motorbikes. The legal content to be discussed is related to the purchase of motorized vehicles that are auctioned online where consumers can feel disadvantaged because they do not obtain information on the current condition of the vehicle, both engine condition and motor vehicle taxation, so consumers/buyers of online auctions feel disadvantaged. Meanwhile, as regulated in Article 4 letter c of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely the right to correct, clear and honest information regarding the conditions and guarantees of goods and/services.

This research is focused on two formulations of the problem, namely how to carry out online auctions for motorized vehicles at the State Property Service Office and Banjarmasin Auction and how effective online auctions are in purchasing motorized vehicles through online auctions at the Banjarmasin State Property Service Office and Auction.

This research uses empirical research, namely research conducted on an event that occurred in the community to be analyzed with theories and applicable legal regulations, namely regarding the Implementation of Auctions Via the Internet (Case Study of Auction Implementation at the Banjarmasin State Wealth and Auction Service Office)

From this research, the first results were obtained. The implementation of online auctions at the Banjarmasin KPKNL consisted of several stages, namely prospective buyers looking at bids for goods through the Banjarmasin KPKNL online auction site www.lelang.go.id, then prospective buyers create an account and complete the required data, then submit bids through the online auction site that has been provided, then for the winner an administration will be made for the handover of the auction item. Second, the author is of the opinion that the implementation of online auctions is ineffective due to incomplete information, the condition of the goods is not suitable so that the auction winner/buyer feels disadvantaged because they are not informed about the complete condition of the

goods so that they often spend more to repair the motor vehicle purchased and pay off arrears taxes that were not informed by the previous online auction organizer.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Husein Umar, (2002), *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenada media.

Mantayborbir.S, (2002), *Hukum Piutang dan Lelang Negara Di Indonesia*. Medan : Pustaka Bangsa Press. 2002.

M. Marwan dan Jimmy P, (2009), *Kamus Hukum : Dictionary of Law Complexe Edition*. Surabaya : Reality Publisher.

Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Praenada Media.

Rachmadi Usman, (2015), *Hukum Lelang*, Jakarta : Sinar Grafika.

Rochmat Soemitro, (1987), *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Bandung : PT. Eresco.

Salbiah, (2004), *Materi Pokok Pengetahuan Lelang*, Jakarta : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan.

Salim H. S, (2004), *Pekembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Shiefti Dyah Alyusi. *Media Sosial : Interaksi, Identitas dan Modal*

Sosial. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group. 2016.

Sutardjo, (1993), *Eksekusi Lelang Barang Jaminan dan Masalah yang timbul dalam Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.

Internet :

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, (2012), *Prosedur Lelang*, <http://www.djkn.depkeu.go.id>. Diakses pada tanggal 13 April 2022.

Karya Ilmiah/Jurnal :

Nabillah Putri Mayangsari, (2019), *Tanggung Gugat Para Pihak Atas Pelanggaran Lelang Secara Elektronik Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Surabaya*. Skripsi. Surabaya : Universitas Airlangga.

Puteri Intan Suhaila, (2019) *Pelaksanaan Lelang Barang Hasil Sita Pajak Melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Secara Online Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Medan*. Tesis. Medan : Universitas Sumatera Utara..

Stefanus Halim. *Keabsahan Lelang Barang Milik Swasta Dengan Media Internet Ditinjau Dari Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Peraturan Lelang*. Jurnal : Universitas Surabaya. 2015.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (1998), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Lelang